

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang kemudian dapat disimpulkan penelitian ini sebagai berikut:

1. ADD diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Peraturan Bupati Kampar No 8 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa meliputi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawbang. Pengawasan kepala desa, kecamatan dan kabupaten dalam pengelolaan ADD sangat berpengaruh terutama dalam penyusunan skala prioritas dalam penetapan rencana kegiatan dan mempertimbangkan potensi desa, kebutuhan masyarakat sehingga hasil pelaksanaan pengelolaan ADD dapat dirasakan secara optimal bagi seluruh lapisan masyarakat dimana dapat diterima semua pihak. Berdasarkan rekapitulasi jawaban responden dari angket dan wawancara yang dilakukan penulis diperoleh jawaban responden pada indikator perencanaan pelaksanaan ADD dengan kategori jawaban ragu-ragu dengan rata-rata sebesar 33 dan persentase sebesar 38%, indikator pelaksanaan ADD dengan kategori ragu-ragu dengan rata-rata sebesar 8 dan persentase sebesar 11%. Indikator pengawasan pada kategori jawaban sangat setuju dan ragu-ragu dengan rata-rata sebesar 28 dan persentase 32% serta indikator pertanggungjawaban pada kategori jawaban sangat setuju dan ragu-ragu dengan rata-rata sebesar 22 dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persentase 25%, berdasarkan rekapitulasi jawaban responden dapat disimpulkan bahwa indikator pengelolaan ADD di desa Alampanjang yang paling dominan adalah indikator pengawasan dan pertanggungjawaban berada pada penilaian ragu-ragu (c).

2. Faktor penghambat dalam melaksanakan pengelolaan ADD terdapat 3 faktor yaitu:
 - a. Sumber kualitas dari aparatur desa yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah
 - b. Adanya ketidak sempurnaan pengatur kebijakan, tentang organisasi pemerintah desa
 - c. Rendahnya kemampuan dalam mengelola dan merencanakan yang berakibat pada ketidak sesuaian antara output (hasil) kebijakan dengan kebutuhan masyarakat yang merupakan input dari kebijakan.

6.2 Saran

- a. Dengan adanya pengaturan hukum ADD, pengelolaan ADD dapat optimal sehingga menunjukkan hasil yang maksimal seperti, rendahnya kemiskinan, pendidikan yang tinggi dan juga optimalnya keswadayan masyarakat, karena kurangnya keswadayan masyarakat merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan. Dengan peningkatan kepastian seluruh pemangku keentingan di desa, diharapkan terjadi perbaikan tata kelola pemerintahan desa. Pengawasan implementasi Undang-Undang Desa akan berjalan dengan baik.

- b. kesiapan warga untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan dan kemampuan melakukan monitoring terhadap program-program yang dilakukan di desa. Meningkatnya sumber daya manusia dapat dilihat dari pendidikan masyarakat dan perangkat desa, sehingga ada bentuk kreatifitas dan inovasi dalam pengelolaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

